



LAPORAN KINERJA (LKj) TRIWULAN I TAHUN 2022



**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
2022**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2022. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada triwulan I tahun 2022. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.

Bitung, 14 April 2022

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Harlyn Raya maharbhakti, S.Pi, M.Si
NIP. 19800314 200312 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) triwulan I tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2022 pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 7 Sasaran Kegiatan dan 26 Indikator Kinerja. Hasil pengukuran pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) pada Triwulan I adalah 105,79 % dari 13 Indikator Kinerja yang telah dilakukan pengukurannya pada Triwulan I tahun 2022 dan 13 Indikator Kinerja belum dilakukan pengukuran di Triwulan I.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2022 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350), Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp42,73 miliar dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2022 Rp2,77 miliar atau 6,49%. Pada tahun 2022 ada beberapa kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung yang dilaksanakan untuk mendukung Program Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu pada kegiatan Operasi Armada Kapal Pengawas dan Speed Boat serta kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan dan Pengawasan Pembudidayaan Ikan, kegiatan pengawasan Kawasan Konservasi serta Pengawasan Kegiatan Penangkapan ikan yang merusak (Destructive Fishing).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024	7
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2022	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja TW I Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung TW I Tahun 2022	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja	17
3.3 Akuntabilitas Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Rekomendasi	40
4.3 Rencan Tindak Lanjut	40

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022	10
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2021	14
Tabel 3	Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW I 2022	17
Tabel 4	Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW I Tahun 2022	18
Tabel 5	Indeks Kinerja Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW I 2022	29
Tabel 6	Indeks Kinerja Speed Boat Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW I 2022	30
Tabel 7	Hasil Survey Indeks Masyarakat Pengguna layanan SLO TW I tahun 2022	35
Tabel 8	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan LVHPI TW I tahun 2022	36
Tabel 9	Realisasi Anggaran Per Kegiatan TW I Tahun 2022	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2	Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	5
Gambar 3	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	14

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada tahun 2022 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari capaian kinerja triwulan I tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
 - a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
 - b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (bius dan bom ikan), penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.
2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
 - a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
 - b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
 - c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
 - b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
 - b. Eksploitasi mangrove.
 - c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Satwas dan Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP di tahun 2022.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

- a. Kepala Pangkalan

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Kepala Subbagian Umum

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan..

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung



Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung



Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a. **Pangkalan PSDKP Bitung**, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
- b. **Satwas SDKP Gorontalo**, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c. **Satwas SDKP Kendari**, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. Dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
- d. **Satwas SDKP Gorontalo Utara**, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.

- e. **Satwas SDKP Makassar**, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
- f. **Satwas SDKP Takalar**, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g. **Satwas SDKP Mamuju**, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP Polewali Mandar.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) triwulan I tahun 2022 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2022; dan
4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2022 dan rekomendasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 – 2024.

Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

1. Visi

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”

2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2020-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (*sovereignty*) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *balanced scorecard (BSC)* yang digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.

5. Peta Strategi dan Sasaran Kegiatan

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:

a. *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

b. *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

c. *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

d. *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran Kegiatan merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran Kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2022 yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2022 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan

Perikanan, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
 - b. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
 - c. Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
 - d. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Daerah
 - b. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
 - b. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya.
 - c. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - d. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
 - e. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
 - f. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 - a. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - b. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - c. Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - d. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang diperiksa kepatuhannya
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - a. Layanan BMN
 - b. Layanan Hubungan Masyarakat
 - c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - d. Layanan Umum
 - e. Layanan Data dan Informasi
 - f. Layanan Perkantoran
 - g. Layanan Sarana Internal
 - h. Layanan Manajemen SDM
 - i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

- j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- k. Layanan Manajemen Keuangan
- l. Layanan Reformasi Kinerja

2.3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2022 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	yang partisipatif			
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas	87,5
		ISK3.2.3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100
		ISK3.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Pendaratan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP	75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Bitung (nilai)	
		ISK5.1.4 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	77
		ISK5.1.5 Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	90
		ISK5.1.6 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		ISK5.1.7 Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)	1
		ISK5.1.8 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	75
		ISK5.1.9 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	75
		ISK5.1.10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	86
		ISK5.1.11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89
		ISK5.1.13 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	81

2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)
Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).
6. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi Kinerja (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>) yang merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

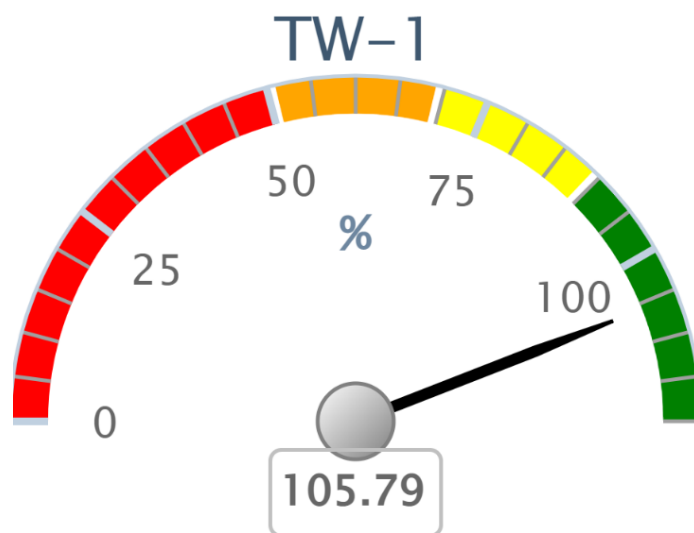
BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I Tahun 2022 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 105,79.

Gambar 3. Capaian Kinerja triwulan I Tahun 2022



Capaian kinerja Triwulan I tahun 2022 sebesar 105,79% apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja ditriwulan I tahun 2021 yakni 111,51% maka terdapat penurunan sebesar 5,72%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan dalam formulasi penghitungan capaian kinerja dalam manual iku.

Pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW I	Capaian TW I	%
S.01	SK1.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan				110.00
ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	100	20	83,33	120.00

S.02	SK2.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan				
IKS.02.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	100	100	100	100.00
S.03	SK3.1 Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif				
ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87	0		
S.04	SK3.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif				103.70
ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	87,5	0	85	100.00
ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas	87,5	0	73,25	100.00
ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90	90	100	111.11
S.05	SK3.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100	0		
ISK3.3.2	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	100	0		
S.06	SK4.1 Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif				100.00
ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93	35	35	100.00
ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93	10	10	100.00
ISK4.1.3	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93	10	10	100.00
ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80	0	100	100.00
ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80	0		
S.07	SK5.1 Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP				109.44
ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80	80	89,99	112.49
ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Pendaratan Ikan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80	80	92,96	116.20
ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75	0		
ISK5.1.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77	0		
ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	90	0		
ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	21	0		
ISK5.1.7	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	1	0		
ISK5.1.8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	75	0		

ISK5.1.9	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	75	0		
ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	86	86	88,33	102.71
ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70	70	70	100.00
ISK5.1.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89	0		
ISK5.1.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	81	0		

(kinerjaku.kkp.go.id tanggal 14 April 2022)

Warna	Keterangan
Baik	≥ 100
Cukup	$70 - < 100$
Kurang	< 70
Belum ada penilaian	
Belum Input Capaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan ditriwulan I tahun 2022, telah dilakukan pengukuran terhadap 13 (Tiga belas) indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dan semua target indikator kinerja dapat tercapai $\geq 100\%$.

Beberapa indikator kinerja yang memiliki target di triwulan I namun belum ada capaian untuk indikator tersebut berdasarkan manual iku maka dinyatakan tercapai sesuai dengan target karena pelaksanaan kegiatannya bersifat kasuistik dan tidak dapat diprediksi. Indikator kinerja yang memiliki target pada triwulan I namun belum ada capaiannya adalah :

- a. Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
- b. Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
- c. Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
- d. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.

Dua indikator kinerja yang tidak ada targetnya ditriwulan I maka dimasukkan sebagai capaian sesuai dengan hasil perhitungan pada manual iku untuk setiap indikator kinerja tersebut, diantaranya :

- a. Indeks kinerja operasional kapal pengawas
- b. Indeks kinerja operasional speedboat pengawas

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas dan Seedboat memiliki target pengukuran capaian kinerjanya pada tiap semester.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja triwulan I tahun 2022 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sasaran Kegiatan 1.1:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Capaian Sasaran Kegiatan 1.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan didukung dengan IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2022 adalah 120%. Capaian IKU pada triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya tidak terjadi kenaikan maupun penurunan nilai capaian, dikarenakan memiliki capaian dengan nilai maksimal yaitu 120%.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp729.668.000 dan sudah terealisasi sampai dengan triwulan I tahun 2022 adalah Rp45.545.600 persentase realisasi anggaran triwulan I tahun 2022 adalah 6,24%.

IKU1 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target capaian IKU penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan pada triwulan I tahun 2022 adalah 20% dan tercapai 83,33%, dengan presentase capaian kinerja 120%.

Tabel 3. Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW I 2022

IDIKATOR KINERJA	2021			2022		
	TARGET TW I	REALISASI	%	TARGET TW I	REALISASI	%
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	50	100	120	20	83,33	120

Perhitungan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan. Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 6 (enam) kegiatan pengawasan, meliputi:

- Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi
- Pengawasan pengelolaan jasa kelautan
- Pengawasan pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan
- Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi
- Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa	Presentase Capaian Pemeriksaan Tahun 2021
1.	Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi	1	100
2.	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan	3	100
3.	Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	2	100
4.	Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan	1	100
5.	Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi	0	0
6.	Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak	6	100
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung		13	100

Rincian informasi capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja di tahun 2021, sebagai berikut:

1. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung sampai dengan Triwulan I 2021 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dengan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan 100%, pelaksanaan kegiatan pengawasan yaitu terhadap PT. Rohtadi yang merupakan unit pengolahan ikan (sirip ikan hiu kering)

yang beralamat di Jln. Perkamil Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado. Lokasi pemeriksaan bertempat di Gudang penyimpanan Jl. Perintis Rt/Rw 004/002 Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa PT. Rohtadi memiliki dokumen perizinan meliputi SIUP, dan SKP, SIPJI Wilayah Sulut.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 46.750.000 dan terealisasi Rp 0, realisasi anggaran TW I tahun 2022 adalah 0%.

2. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2022 meliputi pengawasan pelaku usaha pasir laut dan SDNH lainnya dan pengawasan pelaku usaha wisata bahari, dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut:

Target pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa TW I tahun 2022 sebanyak 3 pelaku usaha terealisasi sebanyak 3 pelaku usaha dengan persentase capaian 100%. Jika dibandingkan dengan capaian TW I tahun 2021 jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 8 pelaku usaha, hal ini menunjukkan terdapat penurunan target jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya. Penurunan capaian disebabkan karena adanya proses pergantian pimpinan sehingga ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pemeriksaan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW I tahun 2022 sebesar Rp96.887.000 terealisasi sebesar Rp6.200.000 dengan persentase penyerapan anggaran 7,17%.

Hasil kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, sebagai berikut:

a. Pengawasan Pelaku Usaha Produk Kelautan

Target penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pengelolaan pasir laut dan SDNH lainnya TW I tahun 2022 sebanyak 1 unit usaha. Pengawasan terhadap perusahaan pasir laut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP nomor: KEP.57/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Perusahaan Pasir Laut, dengan hasil pengawasan terhadap CV. Maju Bersama yang merupakan unit usaha Penambangan pasir sungai yang beralamat di Dusun Kalindu Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kab.

Pasangkayu Sulawesi Barat dan lokasi penambangan berada di Desa Ambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat. perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan, Izin Lokasi, Izin Usaha Perdagangan.

b. Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Kelautan

Pengawasan terhadap pelaku usaha jasa kelautan yaitu pengawasan pelaku usaha wisata bahari, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 3/PER.DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Target capaian pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang diperiksa kepatuhannya di Pangkalan PSDKP Bitung TW I tahun 2022 sebanyak 2 pelaku usaha, realisasi capaian sebanyak 2 pelaku usaha dan persentase capaian sebesar 100%. Rincian hasil kegiatan TW I tahun 2022, sebagai berikut

1. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 15 Maret 2022 di PT. Pantai Tasik Ria Indah yang beralamat di Desa Mokupa, Kec.Tombariri, Kab.Minahasa, Jenis usaha hotel, wisata tirta dan diving dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
2. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 15 Maret 2022 di PT. Manado Underwater Explorations (MUREX) yang beralamat di Desa Kalasey, Kec.Mandolang Kab.Minahasa Sulawesi Utara. Jenis usaha Wisata Selam, Cottage, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

3. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Capaian target pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, ruang laut, dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya di TW I tahun 2022 sebanyak 2 pelaku usaha. Tercapai sebanyak 2 pelaku usaha dengan persentase capaian 100%.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pemeriksaan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, ruang laut, dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp52.250.000 terealisasi sebesar Rp0 dengan persentase penyerapan anggaran 0%.

Informasi kinerja pengawasan terhadap 2 (dua) pelaku usaha pengelolaan ruang laut pada TW I tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Sampai dengan TW I 2022 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 2 (Dua) pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 28 Maret 2022 di Center Point Of Indonesia PT. Citraland City Losari Makassar, dokumen perizinan telah memiliki izin Lokasi reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
 2. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 28 Maret 2022 di Makassar New Port PT. Pelindo Regional IV Makassar, dokumen perizinan Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
- 4 Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya**

Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: KEP.59/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan. Kegiatan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan pada unit usaha yang bergerak di bidang perikanan meliputi usaha pengolahan ikan dan usaha pembudidayaan ikan serta unit usaha yang bergerak di bidang non perikanan meliputi usaha tambang, pembangkit listrik, dan industri minyak kelapa.

Parameter pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yaitu: a) memiliki dokumen perizinan (AMDAL/UKL-UPL/Izin Lingkungan); b) memiliki IPAL; c) kesesuaian IPAL terpasang.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 81.991.000 dan terealisasi sampai dengan TW I tahun 2022 adalah Rp 6.200.000, realisasi anggaran adalah 8.27%.

Pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya. Pada tanggal 2 Maret 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Utara yang beralamat di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara hasil pemeriksaan dilapangan Pelaku Usaha telah memiliki dokumen UKL/UPL yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Izin Pembuangan Air Limbah ke laut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5 Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Pengawasan *destructive fishing* dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan muatan kapal yang berukuran ≤ 10 GT, menyambangi lokasi yang terindikasi terjadinya kegiatan *destructive fishing* serta menindak lanjuti aduan masyarakat terkait adanya aktifitas penggunaan bom dan bius ikan..

Informasi kinerja pengawasan pelaku usaha perikanan yang diperiksa dari kegiatan *destructive fishing* di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW I Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Kartika 09 yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 17 Maret 2022 hasil pemeriksaan menunjuka bahwa kapal tersebut telah memiliki izin dengan nomor 45.21.7198.5223.00646 dan dinyatakan memiliki Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku sehingga Kapal diijinkan melanjutkan kegiatan perikanan
2. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Berkat Rizky yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 17 Maret 2022 hasil pemeriksaan menunjuka bahwa kapal tersebut telah memiliki izin dengan nomor 45.21.7198.631.00071 dan dinyatakan memiliki Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku sehingga Kapal diijinkan melanjutkan kegiatan perikanan
3. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Ampibi yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 23 Maret 2022 hasil pemeriksaan menunjuka bahwa kapal tersebut telah memiliki izin dengan nomor 523/DISPERIK/BPKP/127/VIII/2021 dan dinyatakan memiliki Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku sehingga Kapal diijinkan melanjutkan kegiatan perikanan
4. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Hendry yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 30 Maret 2022 hasil pemeriksaan menunjuka bahwa kapal tersebut telah memiliki izin dengan nomor 523/DISPERIK/TDKP/227/XII-2021 dan dinyatakan memiliki Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku sehingga Kapal diijinkan melanjutkan kegiatan perikanan
5. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Berkat Rizky-04 yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 30 Maret 2022 hasil pemeriksaan menunjuka bahwa kapal tersebut telah memiliki izin dengan nomor 523/DISPERIK/TDKP/19/1-2023 dan dinyatakan memiliki Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku sehingga Kapal diijinkan melanjutkan kegiatan perikanan
6. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Mirdiani-03 yang berlokasi di

Perairan Bitung pada tanggal 30 Maret 2022 hasil pemeriksaan menunjuka bahwa kapal tersebut telah memiliki izin dengan nomor 00.21.7198.5223.00388 dan dinyatakan memiliki Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku sehingga Kapal diijinkan melanjutkan kegiatan perikanan.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *destructive fishing* pada tahun 2022 sebesar Rp 185.121.000 dan realisasi tahun 2022 adalah Rp 19.080.000, realisasi anggaran adalah 11.70%.

Sasaran Kegiatan 2.1:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Capaian Sasaran Kegiatan 2.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung dengan IKU 2 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, target capaian IKU pada TW I tahun 2022 adalah 100% dengan capaian kinerja TW I tahun 2022 adalah 100%.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.712.392.000 dan realisasi TW I tahun 2021 adalah Rp 10.122.000, realisasi anggaran adalah 0,59%. Jika dibandingkan dengan dengan capaian TW I tahun 2021 capaian nya tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan capaian.

IKU2 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan tahun 2022 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Perhitungan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat pemberitahuan ke pelaku usaha, surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan yang diinput ke sistem pelaporan Direktorat PPSDP.

1. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap produk perikanan yang akan diolah telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan baik nasional maupun internasional. Pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan sesuai dengan Perdirjen PSDKP Nomor 6

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko bidang Perikanan.

Target pemeriksaan UPI tahun 2022 adalah 107 Unit pengolahan ikan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dengan tingkat persentase penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan 100%. Sampai dengan TW I tahun 2022 telah dilaksanakan pengawasan UPI terhadap 2 (dua) UPI dengan presentase penyelesaian pemeriksaan 100%. hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap UPI PT. Carvinna Trijaya Makmur yang beralamat di Jl. Arnoldus Sompotan, Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan kaleng dan ikan tuna beku
2. Pengawasan terhadap UPI PT. Brilliant Ocean Fish yang beralamat di Lingkungan I RT 5 Bitung Timur, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 349.992.000 dan realisasi TW I tahun 2022 adalah Rp 4.350.000 persentase realisasi anggaran adalah 2.01%.

2. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2022 belum melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan.

3. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan

Pengawasan Subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Bersuaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor penangkapan ikan dilakukan :

- 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut;
- 03112 - Penangkapan Crustacea di Laut;
- 03113 - Penangkapan Mollusca di Laut;
- 03115 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut;
- 03116 - Penangkapan Echinodermata di Laut;
- 03117 - Penangkapan Coelenterata di Laut;
- 03118 - Penangkapan Ikan Hias Laut;
- 03119 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut;
- 03121 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat;
- 03122 - Penangkapan Crustacea di Perairan Darat;

- 03123 - Penangkapan Mollusca di Perairan Darat;
- 03124 - Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat;
- 03125 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat;
- 03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat; dan
- 03127 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat.

Kategori penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
- c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2021 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
- d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Sampai dengan TW I tahun 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap satu pelaku usaha dengan Kode KBLI 03111 – Penangkapan Pisces/ikan Bersirip di Laut. Pada Pelaku Usaha KM. Nelayan Jaya 168. Dengan hasil kegiatan pengawasan sebagai berikut :

Memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, meliputi 1) Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan, 2) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, 3) Surat Ukur Kapal Perikanan, 4) Buku Kapal Perikanan, 5) Persetujuan Berlayar, 6) Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, 7) Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan dan 8) Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik

Memenuhi pemenuhan kewajiban NSPK, meliputi 1) Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nahkoda, 2) mempekerjakan awak kapal perikanan dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan 3) memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya (Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan, Sertifikat AhliNautika Kapal Perikanan (ANKAPIN), Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN), Sertifikat BST-F, Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan, Sertifikat Keterampilan

Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan, Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan, melaporkan ikan hasil tangkapan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada pelabuhan pangkalan, mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan). Hasil penyelesaian pemeriksaan kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan adalah 100%.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 685.400.000 dan realisasi TW I tahun 2022 adalah Rp. 5.472.000 realisasi anggaran sebesar 0.8%.

4. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pembudidayaan Ikan

Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;

Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor pembudidayaan ikan dilakukan terhadap:

- 03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut;
- 03215 - Pembesaran Mollusca Laut;
- 03216 - Pembesaran Crustacea Laut;
- 03217 - Pembesaran Tumbuhan Air Laut;
- 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;
- 03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;
- 03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba;
- 03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah;
- 03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;
- 03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;
- 03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau;
- 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau;
- 03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau;
- 03212 - Pembenihan Ikan Laut;
- 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar;
- 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau;

03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut;
03214 - Budidaya Karang (Coral);
03219 - Budidaya Biota Air Laut Lainnya;
03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;
03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya;
03231 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut;
03232 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut;
03241 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
03242 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
03261 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau;
03262 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau.
03233 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut;
03243 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar;
03263 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau.

Pada TW I tahun 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap 5 (lima) pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. PT. ARTA SAMUDRA, memiliki Nomor Induk Berusaha 9120108602219 yang beralamat di Kota Bitung Sulawesi Utara Status modal PMA dengan Jenis Kegiatan Usaha sesuai KBLI 03215 - Pembesaran Mollusca Laut
2. PT. SONOK LESTARI MAS, memiliki Nomor Induk Berusaha 9120001282619 yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno No. 60.9, Kel. Bitung Timur, Kec. Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Status modal PMA dengan Jenis Kegiatan Usaha sesuai KBLI 03211 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut
3. CV. DEWI WINDU, memiliki Nomor Induk Berusaha 9120400471207 yang beralamat di Jl. Poros Makassar Parepare KM 98, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Status modal PMDN dengan Jenis Kegiatan Usaha sesuai KBLI 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau
4. PT. ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA, memiliki Nomor Induk Berusaha 8120219232209 yang beralamat di Jl. H.A. Mappanyukki No. 9, Kel. Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Status modal dengan Jenis Kegiatan Usaha sesuai KBLI 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau

5. PT. SINAR BARRU PRIMA, memiliki Nomor Induk Berusaha 8120012210699 yang beralamat di Jl. Poros Makassar Parepare Makassar Lingkungan Jalange, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Status modal PMDN dengan Jenis Kegiatan Usaha sesuai KBLI 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau

Penyelesaian pemeriksaan terhadap pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan tercapai 100% dengan pemenuhan seluruh unsur pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 496.000.000 dan realisasi TW I tahun 2022 adalah Rp. 300.000, realisasi anggaran sebesar 0.8%.

Sasaran Kegiatan 3.1:

Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Sasaran Kegiatan 3.1 Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif didukung oleh IKU Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

IKU3 PERSENTASE POKMASWAS YANG AKTIF MENDUKUNG PENGAWASAN SDKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan I tahun 2022 belum dilakukan Pengukuran terhadap IKU ini dan pengukurannya dilakukan pada Triwulan IV tahun 2022.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 218.180.000 dan realisasi TW I tahun 2022 adalah Rp.0,-

Sasaran Kegiatan 3.2:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif terdiri dari (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Indeks Operasi Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Indeks Operasi Speed Boat Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 9.234.235.000 dan realisasi TW I tahun 2022 Rp 5.212.452.600, realisasi anggaran sebesar 57,16%.

IKU4 INDEKS KINERJA KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Indeks Kinerja Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan TW I tahun 2022 tercapai 85,00 dengan persentase capaian kinerja 100%, Capaian Indeks Kinerja Kapal Pengawas pada TW I adalah 85 sedangkan pada TW I tidak terdapat target capaian sehingga perhitungan capaian

yang dapat diklaim pada TW I adalah 100%.

Target hari operasi pada tahun 2022 adalah 90 HO mengalami penurunan jumlah hari operasi dari tahun 2021 yaitu 120 HO. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun sebelumnya dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022.

Tabel 5. Indeks Kinerja Kapal Pengawas TW I Tahun 2022

Komponen	HIU 02	HIU 05		85
1 Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa (Bobot 20%);				18
Realisasi kapal yang diperiksa	102	58	160	
Jumlah target kapal yang diperiksa	102	72	174	
2 Persentase Coverage Area Pengawasan (Bobot 15%);				17
Realisasi Coverage Area	0,33	0,24	0,57	
Target Coverage Area	0,29	0,20	0,49	
3 Persentase Capaian Hari Operasi (Bobot 15%);				15
Realisasi Hari Operasi	51	36	44	
Target Hari Operasi	51	36	44	
4 Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan (Bobot 10%)				15
Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan per Kapal Pengawas	0	9	9	
Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan keseluruhan	6	6	12	
5 Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing (Bobot 10%)				10
Jumlah Tangkapan Kapal per Kapal Pengawas	0	9	9	
Jumlah tangkapan kapal keseluruhan	0	9	9	
6 Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (Bobot 10%)				10
Jumlah Alat Tangkap yang disita per Kapal Pengawas	0	9	9	
Jumlah alat Tangkap yang disita keseluruhan	0	9	9	
7 Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal (Bobot 10%)				0
Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal per Kapal Pengawas	0	0	0	
Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal keseluruhan	0	0	0	
8 Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR (Bobot 5%)				0
Dukungan Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR per Kapal Pengawas	0	0	0	
Dukungan Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR keseluruhan	0	0	0	
9 Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, destructive fishing dan pelanggaran kelautan lainnya (Bobot 5%)				0

Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, destructive fishing dan pelanggaran kelautan lainnya per Kapal Pengawas	0	0	0	
Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, destructive fishing dan pelanggaran kelautan lainnya keseluruhan	0	0	0	

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 7.116.485.000 dan realisasi TW I tahun 2022 adalah Rp 5.212.452.600 realisasi anggaran sebesar 74,46%.

IKU5 INDEKS KINERJA SPEED BOAT PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Indeks Kinerja Speed Boat Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan TW I tahun 2022 tercapai 73,25 dengan persentase capaian kinerja 100%, Capaian Indeks Kinerja Speed Boat Pengawas pada TW I adalah 73,25 sedangkan pada TW I tidak terdapat target capaian sehingga perhitungan capaian yang dapat diklaim pada TW I adalah 100%.

Target hari operasi pada tahun 2022 adalah 38 HO mengalami kenaikan jumlah hari operasi dari tahun 2021 yaitu 25 HO. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun sebelumnya dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 2.117.750.000 dan sampai dengan TW I belum ada realisasi anggaran, karena masuk dalam pengajuan GU di TW II.

Tabel 6. Indeks Kinerja Speed Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW I Tahun 2022

1	Jumlah kapal yang diperiksa (25%)		23,25
	Realisasi kapal yang diperiksa	93	
	Jumlah target kapal yang diperiksa	100	
2	Persentase Coverage Area Pengawasan (25%)		25,00
	Realisasi Coverage Area	0,05	
	Target Coverage Area	0,05	
3	Persentase Capaian Hari Operasi (25%)		25,00
	Realisasi Hari Operasi	50	
	Target Hari Operasi	50	
4	Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing (15%)		0,00
	Jumlah Tangkapan Kapal per Kapal Pengawas	0	
	Jumlah tangkapan kapal keseluruhan	0	
5	Jumlah Penyitaan alat tangkap terlarang (10%)		0,00
	Jumlah Alat Tangkap yang disita per kapal pengawas	0	
	Jumlah alat Tangkap yang disita keseluruhan	0	
			73,25

IKU6 INDEKS PEMENUHAN LOGISTIK ARMADA PENGAWASAN SDKP

Capaian kinerja IKU Indeks Kinerja Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP sampai dengan TW I tahun 2022 tercapai 90 dari target 90 dengan presentasi capaian kinerja 111%.

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel

- a. Logistik kapal terdiri dari :
 1. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
 2. Pelumas
- b. Logistik Personel terdiri dari
 1. Bahan Makanan
 2. Air Tawar, dan
 3. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

- a) Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);
- b) Pelumas (20%);
- c) Bahan Makanan (30%);
- d) Air Tawar (15%);
- e) Alat-alat Pelayanan (5%)

Sampai dengan Triwulan I tahun 2022 telah dilaksanakan operasi Kapal pengawas beserta pemenuhan logistiknya sehingga pada TW I 2022 target capaian IKU bisa tercapai sesuai target.

Sasaran Kegiatan 3.3 : Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Capaian Sasaran Kegiatan 3.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1). IKU Presentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP. Terdapat satu target pembangunan Prasaran Pengawasan pada Pangkalan PSDKP Bitung yaitu pembangunan Bangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Makassar. 2). IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Pada tahun 2022 di Pangkalan

PSDKP Bitung terdapat 17 unit armada pengawasan yang dirawat yaitu 2 unit Kapal Pengawas, 7 unit Speed Boat, 1 unit Rigid Inflatable Boat dan 7 unit Rubber Boat.

IKU7 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU8 PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

Sasaran Kegiatan 4.1:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 4.1 (SK-4.1) Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan didukung oleh 5 IKU yaitu 1). IKU Persentase efektifitas penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Presentase efektifitas penyelesaian penanganan barang bukti lingkup pangkalan PSDKP Bitung; 3) IKU Presentase efektifitas penyelesaian penanganan awak kapal lingkup pangkalan PSDKP Bitung; 4). IKU Presentase efektifitas penyelesaian penanganan sanksi administratif lingkup pangkalan PSDKP Bitung 5). IKU Persentase efektifitas koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.006.424.000 dan realisasi TW I tahun 2022 adalah Rp 0 realisasi anggaran sebesar 0%. Hal ini karena sampai dengan TW I tahun 2022 Pangkalan PSDKP Bitung belum menangani TPKP dan kegiatan ini bersifat kasuistis yang mana pelaksanaannya tidak dapat diprediksi.

IKU9 PERSENTASE EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum ada perkara yang ditangani sehingga menurut perhitungan di Manual IKU jika tidak ada perkara yang ditangani maka capaian pada TW tersebut dianggap tercapai sesuai target. Target capaian pada TW I 2022 adalah 35 dan tercapai 100%.

IKU10 PRESENTASE EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PENANGANAN BARANG

BUKTI LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum ada perkara yang ditangani sehingga menurut perhitungan di Manual IKU jika tidak ada perkara yang ditangani maka capaian pada TW tersebut dianggap tercapai sesuai target. Target capaian pada TW I 2022 adalah 10 dan tercapai 100%.

IKU11 PRESENTASE EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PENANGANAN AWAK KAPAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum ada perkara yang ditangani sehingga menurut perhitungan di Manual IKU jika tidak ada perkara yang ditangani maka capaian pada TW tersebut dianggap tercapai sesuai target. Target capaian pada TW I 2022 adalah 10 dan tercapai 100%.

IKU12 PRESENTASE EFEKTIFITAS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan TW I 2022 perkara yang ditangani oleh pangkalan PSDKP Bitung adalah 10 perkara yang di kenakan sanksi administrasi. Pada TW I 2022 belum ada target yang ditetapkan namun realisasinya tercapai 100% karena pada TW I telah dilakukan pengenaan sanksi terhadap 10 pelaku usaha perikanan.berikut adalah rincian pengenaan sanksi adminsitration yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Bitung :

- 1 BUDI HARAPAN - 09 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 30 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai Laut jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
- 2 KM. ZAHRA 110 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 24 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
- 3 KM. SAKHI JAYA jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 18 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
- 4 KM. FOR TUNA 53 02 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 14 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
- 5 KM. WAHYU NUR 01 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 23 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
- 6 KM. BINTANG ARIES jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 14 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang

- diberikan SANKSI ADMINSTRASI
- 7 KM. SINAR MANDAR jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 26 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
 - 8 KM. INKA MINA 947 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 30 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
 - 9 KM. CAHAYA LAPEO jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 6 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
 - 10 KM. FADIL JAYA 725 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 13 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI

IKU13 PRESENTASE EFEKTIFITAS KOORDINASI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

Sasaran Kegiatan 5.1:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP

Capaian Sasaran Kegiatan 5.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP di dukung dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 20.506.151.000 dan realisasi TW I tahun 2022 adalah Rp3.308.239.533 realisasi anggaran sebesar 16,13%.

IKU14 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO (SURAT LAIK OPERASI) KAPAL PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik (pengawas perikanan) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO di Pangkalan

PSDKP Bitung dilaksanakan setiap Triwulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Trwulan I tahun 2022 indikator kinerja ini Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO adalah 89,99 dari target 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan SLO pada TW I 2022 adalah 112,49%.

Tabel 7. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan SLO TW I tahun 2022

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3,33	sangat baik	0,37	83,24
U2	Prosedur	3,59	sangat baik	0,40	90,38
U3	Waktu Pelayanan	3,56	sangat baik	0,40	89,06
U4	Biaya/Tarif	3,65	sangat baik	0,41	100,00
U5	Produk Layanan	3,31	sangat baik	0,37	82,71
U6	Kompetensi Pelaksana	3,72	sangat baik	0,41	89,84
U7	Perilaku Pelaksana	3,84	sangat baik	0,43	96,01
U8	Sarana dan Prasarana	3,49	sangat baik	0,39	76,09
U9	Pengaduan Masyarakat	3,94	sangat baik	0,44	98,40
Rata - Rata Semua Unsur				3,5995	
IKR TERHADAP RSS :		89,99			

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 64 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 3,599 dengan angka Indeks sebesar 89,99 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 21.200.000,- dan realisasi anggaran TW I tahun 2022 adalah 0%. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan forum konsultasi publik yang rencananya akan dilaksanakan di TW II.

IKU15 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN LVHPI (LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENANGKAPAN IKAN) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI TW I tahun 2022 adalah 92,96 dari target 80, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan LVHPI adalah 116,20%.

Tabel 17. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan LVHPI TW I tahun 2022

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3,59	sangat baik	0,40	89,86
U2	Prosedur	3,68	sangat baik	0,41	91,89
U3	Waktu Pelayanan	3,68	sangat baik	0,41	91,89
U4	Biaya/Tarif	3,77	sangat baik	0,42	100,00
U5	Produk Layanan	3,54	sangat baik	0,39	88,51
U6	Kompetensi Pelaksana	3,82	sangat baik	0,42	92,57
U7	Perilaku Pelaksana	3,95	sangat baik	0,44	98,65
U8	Sarana dan Prasarana	3,55	sangat baik	0,39	79,73
U9	Pengaduan Masyarakat	3,92	sangat baik	0,44	97,97
Rata - Rata Semua Unsur				3,719	
IKR TERHADAP RSS :		92,96			

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan LVHPI di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 37 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 3,719 dengan nilai Indeks sebesar 92,96 dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam interval nilai konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 21.200.000,- dan realisasi anggaran TW I tahun 2022 adalah 0%. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan forum konsultasi publik yang rencananya akan dilaksanakan di TW II.

IKU16 NILAI WBK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU17 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU18 NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU19 NILAI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU20 UNIT YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU21 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU22 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU23 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Hasil capaian IKU ini pada TW I tahun 2022 adalah 88,33% dari target 2022 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 86%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 102,71%. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW I 2021 yaitu 100 mengalami penurunan 11,67 poin atau sekitar 16,34%. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan keaktifan user aplikasi bitrix dalam proses pencapaian target publikasi melalui akun bitrix pada setiap periodenya.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar

Rp 7.280.000 dan realisasi TW I tahun 2022 adalah Rp. 0.

IKU24 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW II 2022.

IKU25 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW I 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

5.1. Akuntabilitas Anggaran

Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2022 adalah Rp. 42.735.383.000 realisasi anggaran TW I tahun 2022 adalah Rp 9.055.497.190 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 21,18%.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Per Kegiatan sampai dengan TW I Tahun 2022

NO	Kode Nama Kegiatan	Total		
		Pagu	Realisasi	%
1	2350 Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	18.780.748.000	5.290.427.600	28.80
2	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.006.424.000	0	0
3	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	729.668.000	45.545.600	7.79
4	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.712.392.000	4.350.000	1,51
5	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	20.506.151.000	3.709.401.990	18,69
	TOTAL	42.735.383.000	9.055.497.190	21,18

Dari data realisasi di atas, Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran tertinggi ada pada kegiatan Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350) dengan persentase penyerapan 28,80% dan realisasi anggaran terendah pada kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351) dengan persentase penyerapan 0%. Rendahnya realisasi anggaran kegiatan tersebut disebabkan karena sampai dengan TW I 2022 pangkalan PSDKP Bitung belum menangani TPKP yang bersifat kasuistik dan tidak dapat diprediksi pelaksanaannya.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 5 Sasaran Kegiatan dan 13 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada TW I tahun 2022 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 105,79. Semua target pada TW I 2022 dapat tercapai sesuai target. Jika dibandingkan dengan capaian TW I tahun 2021 ada penurunan nilai capaian yaitu 111,51 atau turun 5.72 poin, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan beberapa indikator kinerja dan formulasi penghitungannya.

4.2. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2022, perlu dilakukan peningkatan terhadap capaian kinerja yang capaiannya belum maksimal, salah satu kegiatan yang harus ditingkatkan adalah pengawasan pelaku usaha berdasarkan Juknis terbaru yaitu PERDIRJEN 6 Tahun 2021 tentang pengawasan standar usaha dan produk dibidang perikanan guna mencapai target pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja maupun target dalam RKA-KL.

4.3. Rencana Tindaklanjut

Melakukan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2022 secara terarah dan terukur, dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan pelaksanaan percepatan kegiatan guna menyesuaikan dengan rencana aksi dan target pada setiap triwulannya.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Harlym Raya Maharbhakti**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Harlym Raya Maharbhakti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,5
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
		ISK3.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum	80

“bekerja dengan integritas dan totalitas”

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		ISK5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	81

“bekerja dengan integritas dan totalitas”

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	729.668.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.712.392.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	18.780.748.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.006.424.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	20.506.151.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		42.735.383.000

Jakarta, 26 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

**Adin Nurawaluddin**

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

**Harlym Raya Maharbhakti**